

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan menggunakan *Video Conference* pada masa penerapan PSBB dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Purwakarta telah melakukan pemeriksaan perkara pidana melalui *video conference* sejak dikeluarkannya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemeriksaan perkara pidana melalui *video conference* menggunakan aplikasi *zoom could meetings*, menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan pada aplikasi tersebut memiliki fitur merekam. Rekaman tersebut yang dapat menjadi bukti elektronik dan hal ini dibenarkan dalam KUHAP. Pada masa penyebaran COVID-19 membuat peserta sidang tidak dapat hadir secara langsung, maka dari itu pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana melalui *video conference* dilakukan. Pengadilan Negeri Purwakarta menghadirkan terdakwa melalui *video conference*, sedangkan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum tetap berada di ruang sidang.
2. Kendala yang dihadapi pengadilan pada umumnya yaitu perbedaan sarana-prasana antara kota besar dengan kota kecil dan/atau

kabupaten. Hal ini dirasakan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta karena Purwakarta termasuk Kabupaten, yang dimana fasilitas tidak selengkap kota-kota besar. Dalam hal ini Pengadilan Purwakarta membuat Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 agar dapat memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pemeriksaan perkara melalui *video conference*.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pemerintah harus lebih memerhatikan pengadilan yang berada di daerah terpencil dan kabupaten, terutama untuk sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bagian Teknologi Informasi.
2. Pemerintah atau pengadilan negeri memberikan pelatihan bagi para staff yang berada di pengadilan negeri untuk menambah wawasan dalam Teknologi Informasi agar dapat membantu kelancaran jalannya pemeriksaan perkara pidana melalui *video conference*.
3. Pemerintah dapat menambah alokasi dana untuk pengadilan negeri yang berada di kota kecil atau kabupaten untuk melengkapi infrastruktur dan perlengkapan *video conference* seperti kamera, komputer, jaringan internet yang baik agar jaringan tidak terganggu

dan hal lain yang dapat membantu jalannya pemeriksaan perkara pidana melalui *video conference*.

